**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, tingkat kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan bagi pemerintah untuk mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyajikan laporan keuangan merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu hendaknya laporan keuangan yang disusun memiliki kualitas yang memadai. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Peerubahan ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan yang disajikan tersebut memenuhi kriteria laporan keuangan pemerintah sesuai dengan yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kriteria tersebut ialah Relevan, Andal, Dapat Dipahami, dan Dapat Dibandingkan. Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat terlihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tingkatan opini hasil pemeriksaaan laporan keuangan pemerintah. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004). Opini dengan tingkat tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lalu Tidak Wajar (TW), dan opini dengan tingkat terendah adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Seluruh pemeriksaan BPK RI dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas tidak cukup dengan akuntabilitas keuangan saja, sementara akuntabilitas kinerja ditinggalkan, atau sebaliknya. Keduanya harus diwujudkan, dengan demikian dalam pengelolaan keuangan negara, bagi entitas tidak cukup jika sudah memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, karena opini WTP bukanlah segala-galanya, artinya upaya memperoleh opini WTP hendaknya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan (BPK, 2015).

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sebagai salah satu entitas pemerintah daerah, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, telah menjalankan kewajibannya untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2012 dan laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas 2013, pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk pertama kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2014, kemudian pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2015, Kabupaten Musi Rawas kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga membuat Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).



*Sumber:* *bpk.go.id*

**Gambar 1.1**

**Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini**

Penurunan opini yang terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel 1.1**

**Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entitas Pemerintah Daerah** | | **Opini/Tahun** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Provinsi Sumatera Selatan | | | | | | |
| **1** | Prov.Sumatera Selatan | WDP | WDP | WTP DPP | WTP | WTP |
| **2** | Kab. Banyuasin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| **3** | Kab. Empat Lawang | TMP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| **4** | Kab. Lahat | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| **5** | Kab. Muara Enim | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP |
| **6** | Kab. Musi Banyuasin | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP |
| **7** | Kab. Musi Rawas | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP |
| **8** | Kab. Musi Rawas Utara |  |  | TMP | WDP | WDP |
| **9** | Kab. Ogan Ilir | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP |
| **10** | Kab. Ogan Komering Ilir | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| **11** | Kab. Ogan Komering Ulu | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| **12** | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| **13** | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| **14** | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |  |  | TMP | WDP | WTP |
| **15** | Kota Lubuklinggau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| **16** | Kota Pagar Alam | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| **17** | Kota Palembang | WTP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP |
| **18** | Kota Prabumulih | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: *bpk.go.id*

Meskipun telah mendapatkan opini WTP pada tahun 2016, menurut Abdika Jaya AB. Selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas, sampai saat initerdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain, pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai, penatausahaan persediaan belum tertib, kesalahan penganggaran belanja modal, bendahara pengeluaran terlambat menyetorkan pajak negara.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vita Putri Pamungkas (2017) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan kompetensi sumber daya mausia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, lalu Emilda Ihsanti (2014) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualtas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat membantu kelancaran proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat bermanfaat untuk mempermudah berbagai pihak mengakses informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga akan mendorong terwujudnya transparansi yang menjadi tuntutan. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan sebuah sistem dalam proses penyusunannya, sistem ini dibutuhkan agar proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang handal, baik yang dapat dikerjakan manual ataupun yang terkomputerisasi, yang diterapkan dengan baik diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Di samping pemanfaatan teknologi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan karena sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang laporan keuangan dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan terdahulu, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

**1.3 Batasan Pembahasan**

Penelitian ini memiliki batasan pembahasan, adapun yang menjadi batasan pembahasan adalah penelitian ini menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta kompetensi sumber daya manusia dengan informasi yang diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Musi Rawas.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan dan di Instansi/Lembaga Pemerintahan.

1. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti yang mengerjakan penelitian yang kemungkinan sama.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta kompetensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.